



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RATIH HAPSARI KUSUMAWARDANI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
3. NHK : 110810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.699.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m²/140 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 163 m² di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 504.000.000
3. Tanah Seluas 262 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 99 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 130.542.610

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.625.346

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.902.967.956

III. HUTANG Rp. 587.032.381

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.315.935.575

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.